



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN 2023



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Radin Jambat No. 02 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

BLAMBANGAN UMPU - 34711

Email : Bpbdwaykanan.01@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk melakukan penilaian kinerja.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun oleh suatu Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi tentang Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran baik APBD maupun APBN. Dengan adanya RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.

Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum Optimal, oleh karena itu kami sangat berterimakasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan peyempurnaan untuk menyusun RKT dimasa yang akan datang. Harapan kami selanjutnya dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini yang juga merupakan Dokumen perencanaan Kinerja dapat dijadikan bahan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023 yang pada akhirnya Dokumen penetapan Kinerja (PK) 2023 ini akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.

Paradina Utama Muda
NIP.197700301 199703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Tugas dan Fungsi	6
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	27
2.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan.....	27
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	28
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	30
2.4. Sumber Daya Aparatur BPBD.....	31
2.5. Sarana dan Prasarana Aparatur	33
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1. Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan	35
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	37
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. IKU Tahun 2023	
2. Penjelasan/Formula IKU 2023	
3. RKT BPBD 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Kemudian berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dan merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis (cara mencapai dan sasaran), yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026. Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Daerah untuk Penanggulangan Bencana Daerah (Renstrada) Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD PB) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang akan berlaku untuk periode 5 tahun. Renstrada PB ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2010, Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 31). Rencana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB) akan menjadi landasan untuk memasukkan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan kerja organisasi lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Untuk mendukung Visi Kabupaten Way Kanan, BPBD Kab. Way Kanan mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur BPBD Kab. Way Kanan sehingga tugas pokok dan fungsi BPBD Kab. Way Kanan dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien. Guna pelaksanaan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan. Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi BPBD Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan tahun 2023 yang berkelanjutan, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021–2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan instansi yang terkait.

1.4 Tugas dan Fungsi

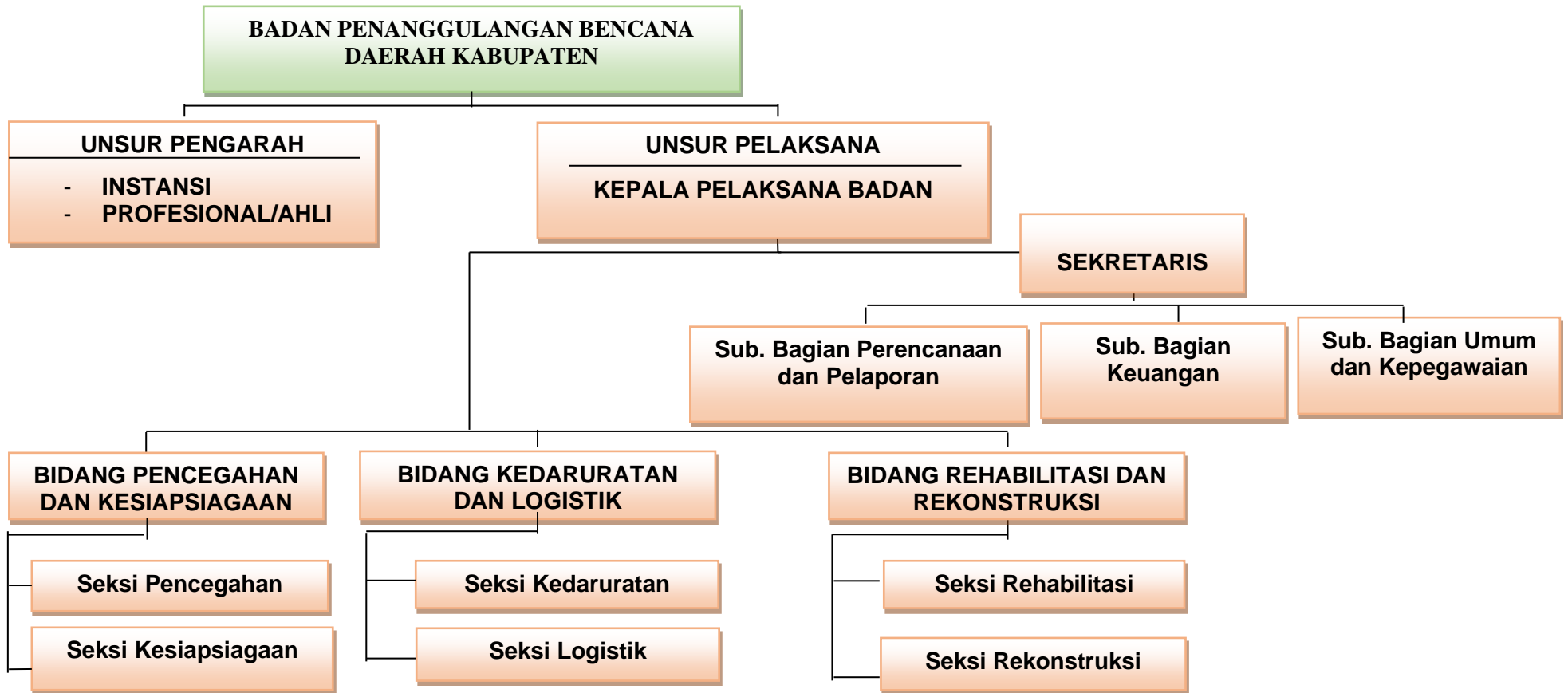
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Organisasi lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan Organisasi badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana

2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan.
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan.
 - b. Kepala Seksi Logistik.
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi.
 - b. Kepala Seksi rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, disajikan pada Gambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
STUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN



(Tabel Struktur Organanisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 dan Perda nomor 08 tahun 2016 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- (a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (g) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- (h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- (b) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan umum tidak kehilangan makna, maka tetap bertujuan untuk menggenapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD;

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan sarana Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevakuasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai tugas :

- a. tugas Pokok Kepala Pelaksana adalah memimpin Badan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Badan agar melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. untuk menyelenggarakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;

- 4) wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- 5) pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas Sekretaris

Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- b. Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan penanggulangan bencana;
- c. dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - c.1. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang-bidang di badan, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - c.2. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c.3. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan;
 - c.4. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;

- c.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Sekretariat, membawahi:
 - d.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d.3. Sub Bagian Keuangan
 - d.1.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan bencana serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program.

Untuk meyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program penanggulangan bencana;
- b. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- c. Menyusun data statistik bidang penanggulangan bencana;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) lingkup badan;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang penanggulangan bencana;
- g. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan penanggulangan bencana;

- i. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan badan penanggulangan bencana;
 - j. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d.1.2. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dan kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga, inventarisasi aset di lingkungan satuan kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
 - b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;
 - c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile, perpustakaan, pramu tamu dinas serta pengemudi kendaraan dinas;
 - d. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan satuan kerja mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;
- k. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1.3. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan penanggulangan bencana;
- b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup badan penanggulangan bencana;

- c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas ;
- g. Membagi habis tugas pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- i. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- k. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;

- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Pencegahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesiapsiagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kesiapsiagaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Kesiapsiagaan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
- f. darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- h. Membagi habis tugas pada bidang Kedaruratan dan Logistik kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- j. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- l. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk
- n. dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas pokok Kepala Seksi Kedaruratan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
- c. saat tanggap darurat;
- d. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksana Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap Darurat dan penanganan pengungsi;
- g. Memantauan, Mengevaluasi, dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kedaruratan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. membagi habis tugas seksi Kedaruratan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- j. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Logistik

Tugas pokok Kepala Seksi Logistik adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dukungan logistik;
- b. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- d. melaksanakan Komando pelaksanaan penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- f. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Logistik agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

- h. membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. membagi habis tugas pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- g. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- h. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- j. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

6.1. Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal rehabilitasi;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi Pasca Penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. memantauan, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rehabilitasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. membagi habis tugas seksi Rehabilitasi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

6.2. Uraian Tugas Kepala Seksi Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Seksi Rekonstruksi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Rekonstruksi Pasca Penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. memantauan, Mengevaluasi dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rekonstruksi agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. membagi habis tugas seksi Rekonstruksi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Suatu tim yang dibentuk oleh kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji secara cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi

penilaian kebutuhan (Needs Assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assesment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATLAK PB/BPBD Kabupaten) dalam penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan tugas kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penanganan tanggap darurat bencana, mengaktifasi posko penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam Penanganan Bencana.

9. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas-PB)

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana yang tersebar di kampung setiap kecamatan.

10. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas dan Fungsi

BAB. II RENCANA STRATEGIS

- 2.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4. Sumber Daya BPBD
- 2.5. Perlengkapan

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

- 3.1 Program dan Penjabaran Program kedalam Kegiatan
- 3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Way Kanan
- 2. Penjelasan /Formula IKU
- 3. Struktur Organisasi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk periode tahun 2021-2026 adalah:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis Kawasan didukung Ketersediaan Infrastruktur

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam Misi ke-3 **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah”**. Dengan Sasaran yaitu **“Mengurangi Dampak Bencana”** dan Strategi **“Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”** dicirikan oleh indikator kinerja sebagai berikut : **“Indeks Ketahanan Daerah”**

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Pembangunan Daerah yaitu (1) Program Penanggulangan Bencana; (2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan Sasaran SKPD ditetapkan untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Misi ke-3 yaitu: *“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”*. Tujuan RPJMD yang terkait dengan BPBD Kab. Way Kanan adalah *“Mengurangi Dampak Bencana”* dengan sasaran strategis *“Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”*

Dalam rangka mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dimaksud, maka BPBD Kabupaten Way Kanan merumuskan Tujuan dan Sasaran SKPD. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2026 adalah **“Mengurangi Dampak Bencana”**, dengan indikator tujuan : **“Indeks Resiko Bencana”**. dan untuk terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Way Kanan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mengurangi dampak bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut yaitu:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana.
2. Tahap tanggap darurat bencana yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana, dengan indikator:
 - % Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana
2. Meningkatnya Penanganan Kejadian Bencana, dengan indicator:
 - % Kejadian Bencana yang ditangani
3. Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana
 - % Penanganan Pasca Bencana
4. Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD, dengan indikator kinerja:

- Nilai Sakip BPBD

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Kab. Way Kanan

Tujuan	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mengurangi Dampak Bencana	1	Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana	% Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana
	2	Meningkatnya Penanganan Kejadian Bencana	% Korban Bencana dan Musibah yang di tangani
	3	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	% Penanganan Pasca Bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD

Berdasarkan hasil dari LHE SAKIP BPBD Kab. Way Kanan, terdapat perbaikan terkait kualitas rumusan sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan Indikator Kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan beberapa perbaikan yang perlu untuk di benahi dan dikaji ulang. Mekanisme dari itu BPBD Kab. Way Kanan telah melakukan pengkajian ulang terkait Kualitas rumusan sasaran dan juga indikator kinerja sasaran agar dapat memenuhi kriteria SMART. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Way Kanan Bapak Hendry Syahri, ST, MT telah berkoordinasi ke Inspektorat dengan Ibu Desi Arisandi, ST. dan Jullana Amalia, S.Si juga berkoordinasi ke Bappeda dengan Sekretaris Bapak Harmadi, SP, M.Si terkait perbaikan IKU BPBD Kab. Way Kanan. Hasil dari koordinasi tersebut maka BPBD Kab. Way Kanan melakukan perbaikan IKU BPBD untuk tahun 2023, dilakukannya perbaikan Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Kab. Way Kanan yang di muat dalam IKU sebagai berikut:

Berdasarkan perubahan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Daerah, dengan indikator:
 - Indeks Ketahanan Daerah

2. Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD, dengan indikator kinerja:
 - Nilai Sakip BPBD

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Kab. Way Kanan

Tujuan	No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama
Mengurangi Dampak Bencana	1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu mendatang (2021-2026) adalah:

- “a) Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana,
b) Meningkatnya Kejadian Bencana yang ditangani,
c) Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana”**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka ditentukanlah langkah-langkah yang akan di ambil sebagai suatu Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaann Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau 5 (lima) priode melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sesuatu rencana kinerja tahunan. Secara keseluruhan prioritas yang hendak dicapai tersebut adalah:

1. Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
2. Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesipasiagaan Terhadap Bencana.
3. Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2.4 Sumber Daya Aparatur BPBD

Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 didukung oleh 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) orang pegawai, terdiri dari:

- a) 17 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) 8 Orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
- c) 31 Orang Tim Reaksi Cepat (TRC)
- d) 280 Satgas Penanggulangan Bencana (Satgas-PB)

Kondisi pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menurut Latar Belakang Pendidikannya:

Tabel 2.2

**Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Latar Belakang tahun 2023**

No	Kepegawaian		Latar Pendidikan					Jumlah
			SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	ASN	17	-	2	-	8	7	17
2	PTHLS	8	-	6	-	2	-	8
3	TRC	31	-	26	1	4	-	31
4	Satgas-PB	280	-	-	-	-	-	280
Jumlah		336	-	34	1	14	7	336

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan masih ada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang belum diangkat menjadi PNS. Dari tabel tersebut, dijabarkan dengan terdapat 7 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 2, 8 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 1, 2 ASN dengan pendidikan tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 PTHLS dengan pendidikan terakhir Strata 1, 6 PTHLS dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 Anggota TRC dengan pendidikan terakhir Strata 1, 1 Anggota TRC dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 26 Anggota TRC dengan pendidikan

terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terdapat 280 Anggota Satgas-PB yang tersebar di Kecamatan.

2. Menurut Golongan:

Tabel 2.3
Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Kepegawaian		Gol/Ruang				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	ASN	17	-	2	12	3	17
2	PTHLS	8	-	-	-	-	7
3	TRC	31	-	-	-	-	31
4	Satgas-PB	280	-	-	-	-	280
Jumlah		336	0	2	12	3	336

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan IV dengan jumlah ASN sebanyak 3 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan III dengan jumlah ASN sebanyak 12 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan II dengan jumlah sebanyak 2 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 0.

3. Jumlah Jabatan Struktural:

Tabel 2.4
Jumlah Jabatan Struktural BPBD Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

No	Kepegawaian	Jabatan Struktural			Jumlah
		Ess IV-a	Ess III-b	Ess II-b	
1	ASN	9 Orang	4 Orang	1 Orang	14
2	PTHLS	-	-	-	-
3	TRC	-	-	-	-
4	Satgas-PB	-	-	-	-
Jumlah		9	4	1	14

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Formasi Jabatan Struktural yang tersedia, sampai dengan Tahun 2023 terisi formasi dengan rincian sebagai berikut : Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang dan Eselon IV-a sebanyak 9 orang.

2.5 Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan baik, namun sampai saat ini sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat minim sekali dan diharapkan kedepan adanya kelengkapan dalam sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti Gedung penyimpanan Logistik, Obat-obat serta peralatan Penanggulangan Bencana.

Untuk mencapai lokasi bencana BPBD sendiri masih membutuhkan Peralatan dan Kendaraan Operasional. Adapun Peralatan dan Kendaraan Operasional yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan saat ini berjumlah 13 Unit, 1 Unit Mobil Inova, 4 Unit Mobil Tanky (1 Unit perolehan tahun 2017, 2 Unit perolehan Tahun 2019 dan 1 Unit Hibah BNPB Tahun 2015) serta 1 Unit Mobil Rescue (Hibah BNPB). Serta 6 unit Kendaraan Roda 2 (4 Unit Hibah BNPB dan 3 Unit perolehan Tahun 2013) berikut jumlah Kendaraan BPBD saat ini :

Tabel 2.5
Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 BPBD Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Inova	1	1		
2	Mobil Rescue	1			1
3	Mobil Tanky	4	3	1	
4	Motor	7	7		

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel 2.6
Rekap Peralatan BPBD Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Motor Trail	4	4		

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
2	Tenda Pengungsi	4	2		2
3	Valbed				
4	Mesin Perahu	4	2		2
5	Perahu	5	2		3
6	Tenda Posko	1			1
7	Tenda Keluarga	12	12		
8	Lampu Senter Searchlight	16	6		
9	Solar Handle Lamp	12	√		
10	Genset 5,5 Kva	5	4	1	
11	Water Treatment Portable	1	1		1
12	Rig	1	1		
13	SSB	1	1		
14	Handy Talky	26	15		11
15	Lampu Penerangan				
16	Mobil Rescue	1			1

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai lokasi di 15 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan pada saat terjadi bencana, BPBD Kabupaten Way Kanan memerlukan peralatan dan kendaraan Operasional yang memadai, dikarenakan kondisi kendaraan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD kabupaten Way Kanan saat ini banyak yang sudah dalam kondisi Rusak Berat.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Program dan Penjabaran Program ke dalam Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini berisi target secara terinci dari setiap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dalam lampiran 1.

Rencana Kinerja Tahunan 2023 tersebut secara rinci terdapat dalam lampiran 3 dokumen ini. Adapun program dan kegiatan di dalam rencana kinerja tahunan 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan:

a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **Program Penanggulangan Bencana** dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan:

a. *Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*

Sub kegiatan

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis bencana)

b. *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*

Sub Kegiatan

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

c. *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*

Sub Kegiatan

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

d. *Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*

Sub Kegiatan

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2023, berdasarkan rencana anggaran BPBD Kabupaten Way Kanan tahun 2023 telah dianggarkan dana belanja langsung sebesar Rp 4.242.689.459,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBD Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1

Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2023 yang bersumber dari APBD

No	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	3	4
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.880.156.459,-	Rp. 1.880.156.459,-	APBD
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.362.533.000,-	Rp. 2.362.533.000,-	ABPD
JUMLAH		Rp. 3,677,572,869,-	Rp. 4.242.689.459,-	ABPD

Tabel 3.2.

Rencana Kinerja Akuntabilitas Keuangan Yang Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Ket.
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			

No	Program	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Ket.
1	2	3	4	5
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	2.383.172.269,-	2.403.288.859,-	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.150.000,-	18.150.000,-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,-	8.000.000,-	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3.150.000,-	3.150.000,-	APBD
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,-	7.000.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.880.091.869,-	1.886.188.459,-	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.874.059.869,-	1.880.156.459,-	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,-	3.000.000,-	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.032.000,-	2.032.000,-	APBD
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,-	1.000.000,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.296.400,-	178.296.400,-	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.114.000,-	8.114.000,-	APBD
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.697.400,-	11.697.400,-	APBD
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.195.000,-	38.195.000,-	APBD
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.490.000,-	17.490.000,-	APBD
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	102.800.000,-	102.800.000,-	APBD

No	Program	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Ket.
1	2	3	4	5
	SKPD			
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,600,000,-	166.620.000,-	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000,-	37.800.000,-	APBD
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.820.000,-	128.820.000,-	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,034,000	154.034.000,-	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,-	55.000.000,-	APBD
	b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.934.000,-	85.934.000,-	APBD
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000,-	4.000.000,-	APBD
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.100.000,-	9.100.000,-	APBD
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.294.400.600,-	1.839.400.600,-	
6.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	453.698.600,-	453.698.600,-	
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis bencana)	453.688.600,-	453.688.600,-	APBD
7.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	756,012,000,-	1.076.012.000,-	
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	271,012,000,-	591.012.000,-	APBD
	b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,-	20.000.000,-	APBD

No	Program	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Ket.
1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	465.000.000,-	465.000.000,-	APBD
8.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52,690,000,-	277.690.000,-	
	a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20,000,000,-	220.000.000,-	APBD
	b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	32,690,000,-	57.690.000,-	APBD
9.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	32.000.000,-	32.000.000,-	
	a. Penangana Pascabencana Kabupaten/Kota	32.000.000,-	32.000.000,-	APBD
JUMLAH		3,677,572,869,-	4.242.689.459,-	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen RKT adalah salah satu dokumen rencana kinerja tahunan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Program dan Kegiatan besaran target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 dalam rangka mencapai target indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang pada akhirnya akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023. Rencana Kerja Tahunan badan penanggulangan bencana daerah Way Kanan digunakan sebagai media data dan informasi yang dapat digunakan sebagai gambaran yang agregat untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan tahunan dalam rangka mencapai kabupaten memantau pencapaian kegiatan tersebut dari tahun ketahun. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung dengan pendanaan yang memadai maka kegiatan pembangunandapat berjalan dengan lebih optimal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, namun BPBD Kabupaten Way Kanan telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Demikian penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) BPBD Kabupaten Way Kanan tahun 2023 agar dapat dijadikan pedoman dan arah

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis, proporsional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD Kabupaten Way Kanan dan upaya peningkatan layanan kepada stakeholder.

Blambangan Umpu, 20 Juli 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Way Kanan,



HENDRI SYAHRI, S.T.,M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700301 199703 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023-2026**

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						SUMBER DATA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mengurangi Dampak Bencana	Mengurangi Dampak Bencana		Indeks Resiko Bencana	POIN	131.19	131.19	118.00	116.00	114.00	112.00	Rilis BNPB
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	POIN	0,20	0,42	0,48	0,51	0,54	0,57	Rilis BNPB
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	POIN	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	KEMENPAN RB
		Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD	Nilai Sakip BPBD	POIN	49,78	52,78	64,00	65,00	66,00	67,00	Inspektorat Kabupaten

**PENJELASAN/FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	POIN	Hasil Rilis BNPB	Rilis BNPB	IKU
2	Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD	Nilai Sakip BPBD	POIN	Inspektorat Kabupaten	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten	IKU

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

TAHUN : 2023
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12
Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil Rilis BNPB	Poin	0,48	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kampung Tangguh Bencana	0,28 Poin	1.044.710.600	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	525 Orang	453.698.600		
							1 Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	525 Orang	453.698.600	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terlaksana		591.012.000		
							2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	311 Orang	591.012.000	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Korban Bencana dan Musibah yang ditangani	100%	762.690.000	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
							2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana	100%	485.000.000		
							1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	13 Unit	20.000.000	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	31 Orang	465.000.000	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

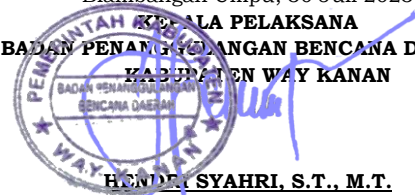
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12
							3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana		277.690.000		
							1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis bencana kejadian bencana	50 Orang	220.000.000	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
							2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat pemenuhan kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi	100%	57.690.000	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
							1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana	100%	32.000.000	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
							Penatanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia		32.000.000		
							1 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen	32.000.000	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	2	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD	Inspektorat Kabupaten	Poin	64,00	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.403.288.859	Sekretaris
							1 Perencanaan Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	18.150.000		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.150.000	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	7.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	100%	1.886.188.459		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	1.880.156.459	Kasubbag Keuangan	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.000.000	Kasubbag Keuangan	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.032.000	Kasubbag Keuangan	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1.000.000	Kasubbag Keuangan	
							3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	178.296.400		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	8.114.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	11.697.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	38.195.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	17.490.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	166.620.000		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	37.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	128.820.000	Kasubbag Keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	
							6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	154.034.000			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	55.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	85.934.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	24 Unit	4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 Unit	9.100.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
		SUBTOTAL									4.242.689.459		

Blambangan Umpu, 30 Juli 2023

KOPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN



HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP : 19700301 199703 1 008